

KATA PENGANTAR

Disertasi ini tidak akan pernah bisa selesai ataupun tuntas tanpa bimbingan yang berkesinambungan dari Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. selaku promotor dan Dr. V. Henry Soelistyo Budi, S.H., L.L.M sebagai co-promotor saya.

Disertasi ini juga menjadi semakin lengkap atas koreksi dan masukan yang sangat membangun dari para oponen Ahli sejak tahap pengajuan proposal. Dan seluruh upaya saya dalam studi selama di Universitas Pelita Harapan program S3 Hukum tidak akan bisa sampai pada hari ini dimana saya diberikan kesempatan mempertahankan Disertasi ini secara terbuka pada 14 Oktober 2017 tanpa restu Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Prof. Dr. Bintan R Saragih dan Rektor Universitas Pelita Harapan Dr. (Hon) Jonathan L Parapak, M.Eng.Sc.

Saya tidak bisa melupakan dukungan dan pengertian yang luar biasa dari rekan-rekan di Ferry Ricardo And Partners dari awal penulisan hingga diselesaikannya Disertasi ini.

Akhirnya tanpa restu, doa dan dukungan moral yang tak terhingga dari keluarga saya yang tercinta, saya tidak saja berkesempatan belajar dan berkembang tapi juga didorong untuk mengabdikannya bagi umat manusia. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada semua pihak yang telah saya sebut diatas maupun yang tidak bisa atau terlupa saya sebut satu persatu.

Kiranya Kasih dan Damai Sejahtera Allah yang melampaui akan dan pikiran manusia menyertai Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian serta saya

sekeluarga. Dan kiranya saya selalu dapat berpegang pada nasihat Raja Salomo bahwa “Takut akan Allah adalah awal dari segala pengetahuan.”

Jakarta, 14 Oktober 2017

Ferry Ricardo



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DISERTASI	iii
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI DISERTASI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.1.1. Badan Usaha dan Perusahaan.....	1
1.1.2. PT sebagai Salah Satu Bentuk Perusahaan	6
1.1.2.1. PT sebagai Badan Hukum.....	8
1.1.3. PT, Utang dan Persoalannya	15
1.1.4. Permasalahan dalam PKPU	19
1.2. Rumusan Masalah	28
1.3. Tujuan Penelitian	28
1.4. Kegunaan Penelitian.....	29
1.5. Sistematika Penulisan Hasil Penelitian Disertasi.....	30
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	32
2.1. Landasan Teori.....	32
2.1.1. Teori Keadilan dalam Pandangan Para Ahli	37

2.1.1.1. Teori Keadilan Aristoteles	38
2.1.1.2. Teori Keadilan Hans Kelsen	41
2.1.1.3. Teori Keadilan John Rawls	45
2.2. Tinjauan Umum Teori Tentang Perseroan Terbatas	50
2.2.1. Dasar Hukum Pendirian Perseroan Terbatas.	50
2.2.2. Struktur Organ Perseroan Terbatas	53
2.2.3. Doktrin Pertanggungjawaban Hukum Direksi Perseroan Terbatas.	65
2.2.3.1. Doktrin <i>Piercing The Corporate Veil</i>	65
2.2.3.2. Doktrin <i>Fiduciary Duty</i>	71
2.2.3.3. <i>Self Dealing Transaction</i>	75
2.2.3.4. Doktrin <i>Intravires</i> dan <i>Ultravires</i>	77
2.2.3.5. Doktrin <i>Corporate Opportunity</i>	78
2.2.3.6. Doktrin <i>Business Judgement Rule</i>	79
2.2.3.7. Doktrin <i>Insider Trading</i>	82
2.2.3.8. Doktrin <i>Derivative Action</i>	85
2.2.4. Teori Badan Hukum	86
2.2.5. Teori Pertanggungjawaban.....	94
2.2.5.1. Pertanggungjawaban Pidana	101
2.2.5.2. Pertanggungjawaban Perdata	105
2.2.5.3. Teori Pertanggungjawaban Mutlak.....	107
2.2.5.4. Teori Pertanggungjawaban Pengganti.....	109
2.2.6. Teori Identifikasi.....	111
2.2.7. Perbuatan Melawan Hukum.....	112

2.2.8. Wanprestasi.....	116
2.3. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perseroan .	120
2.3.1. Unsur-Unsur Pelaksana dalam Proses PKPU	127
2.3.1.1. Pengadilan Niaga dan Hakim Pengawas.....	127
2.3.1.2. Pengurus Dalam PKPU	129
2.3.1.3. Panitia Kreditur	138
2.4. Landasan Konseptual	142
BAB III : METODE PENELITIAN.....	155
3.1. Jenis Penelitian.....	155
3.2. Pendekatan Penelitian..	160
3.3. Bahan Hukum....	163
3.3.1. Bahan Hukum Primer.....	163
3.3.2. Bahan Hukum Sekunder..	164
3.3.3. Bahan Hukum Tertier.....	165
3.3.4. Bahan Non-Hukum	165
3.4. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	166
3.5. Sifat Analisis	167
3.6. Pendekatan Masalah.....	168
3.7. Teknik Pengumpulan Data.....	174
3.8. Analisis Data	174
BAB IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN	181
4.1 Bagaimana Pengaturan Mengenai Tanggungjawab Hukum Direksi Perusahaan Pada Suatu Perseroan Terbatas Di Indonesia Yang Telah Berada Dalam Homologasi PKPU	181

4.1.1	Fungsi Direksi Menurut UUPT	181
4.1.2	Pertanggungjawaban menurut Doktrin Hukum Perusahaan.....	194
4.2	Bagaimana Implementasi Pengaturan Mengenai Tanggungjawab Direksi Pada Perusahaan Yang Memasuki Tahap PKPU di Indonesia	213
4.2.1	Putusan No. 48/pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst antara <i>PT. Telkomsel dan PT Prima Jaya Informatika</i>	213
4.2.1.1	Pokok Perkara	213
4.2.1.2	Analisis.....	215
4.2.2	Putusan Nomor:OS/PKPU/2006/PN.NIAGA.JKT.PST.JO Nomor:13/PAILIT/2006/PN.NIAGA.JKT.PST antara PT. Indah Raya Widya Plywood dengan PT. Bank Negara Indonesia.....	219
4.2.2.1	Pokok Perkara	219
4.2.2.2	Analisis.....	222
4.2.3	Putusan Nomor : 28/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst- 05 HP tentang PT. Mitra Safir Sejahtera (Developer “Rumah Susun Kemanggisian Residences”).	227
4.2.3.1	Pokok Perkara	227
4.2.3.2	Analisis.....	237
4.2.4	Putusan Nomor: 64/PKPU/2012.PN.NIAGA.JKT.PST antara PT. First Media Tbk dengan Acrossasia Limited. 237	

4.2.4.1 Pokok Perkara	237
4.2.4.2 Analisis.....	239
4.2.5 Putusan Nomor : 355 K/Pdt.Sus-PKPU/2013 antara PT. Energi Tata Persada melawan ACG (South Bangara – II) Pte.Ltd	241
4.2.5.1 Pokok Perkara	241
4.2.5.2 Analisis.....	245
4.2.6 Putusan No. 21/Pdt.Sus/PKPU/PN NIAGA JAK-PUS antara Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada dengan Kreditur	246
4.2.6.1 Pokok Perkara	246
4.2.6.2 Analisis.....	255
4.2.7 Putusan Nomor: 35/Pdt-PKPU/2017/PN.NIAGA.Jkt.Pst antara Koperasi Cakrabuana Sukses Indonesia(CSI) Dengan Kreditur.....	254
4.2.7.1 Pokok Perkara	254
4.2.7.2 Analisis.....	257
4.2.8 Putusan No.47/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst antara PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama dengan Nippon Catalyst Pte Ltd.....	257
4.2.8.1 Pokok Perkara	257
4.2.8.2 Analisis.....	259

4.2.9	Putusan No.84/Pdt.Sus.PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst mengenai PKPU antara PT. Geo Link Nusantara dengan PT. Sentosa Eka Perdana Prima	260
4.2.9.1	Pokok Perkara	260
4.2.9.2	Analisis.....	262
4.3	Bagaimana Sebaiknya Pengaturan Mengenai Penyelesaian Hutang Piutang Oleh Perusahaan Yang Berada Dalam PKPU, Terutama Untuk Dapat Tetap Menjamin Kepastian Hukum, Kepastian Usaha Dan Keadilan.....	264
4.3.1	Amandemen Undang-undang Kepailitan dan PKPU.....	268
4.3.2	Sinkronisasi UUPT dengan KUHPidana	287
4.3.3	Implementasi Pasal 155 UUPT dengan Doktrin Ultra Vires	290
4.3.4	Melibatkan Kepolisian dan Pusat Pelapolaran Analisa dan Transaksi Keuangan	298
4.3.4.1	Kepolisian Republik Indonesia	298
4.3.4.2	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).....	305
BAB V : PENUTUP		311
5.1	Kesimpulan	311
5.2	Saran-Saran	318
DAFTAR PUSTAKA		323

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Contoh kasus PKPU yang Berjalan Tidak Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.....	24
Tabel 1.2	Perbedaan antara Kepailitan dan PKPU.....	124

